

PERJUANGAN HAK ATAS PERMUKIMAN DAN KAWASAN HUTAN LINDUNG KELURAHAN GADING SARI KECAMATAN KUNDUR

Oleh
Elvin Yofinda Salko
NIM. 180569201006

ABSTRAK

Fenomena konflik tanah merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia untuk hidup sehingga setiap manusia berusaha untuk memiliki dan menguasai. Salah satu konflik tanah yang terjadi adalah konflik pada kawasan hutan lindung yang hanya memiliki hutan dan fungsi pokok lindung tetapi kenyataannya, penetapan kawasan hutan lindung yang ada di Kelurahan Gading Sari merupakan kawasan permukiman penduduk, fasilitas umum, lahan garapan masyarakat dan bukan merupakan hutan alami. Kenyataan bahwa hutan tidak lepas dari unsur adanya manusia seperti keberadaan masyarakat lokal yang telah bermukim bergenerasi di wilayah tersebut. Bahkan sebelum adanya aturan negara, maka konteks kawasan hutan harus ditempatkan dalam pola pikir tata ruang dan interaksi antar unsur. Kondisi ini mengkhawatirkan masyarakat setempat atas kepemilikan yang mereka punya, tumpang tindih regulasi yang dialami masyarakat membuat masyarakat tetap harus mempertahankan hak atas tempat tinggal untuk keberlangsungan hidup. Sementara pemerintah berupaya untuk tetap menjalankan kebijakan yang dalam hal ini adalah menjaga kawasan Hutan Lindung sesuai fungsinya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perjuangan hak atas permukiman dan kawasan hutan lindung Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur dengan menggunakan teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan informan sebanyak 12 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa habitus yang dimiliki oleh masyarakat dipahami bahwa Kelurahan Gading Sari tidaklah dimiliki oleh siapapun, namun aturan yang telah dikeluarkan pemerintah sebagai modal simbolik akan merubah habitus masyarakat dan menjadikan Kelurahan Gading Sari sebagai arena perjuangan dengan berbagai modal yang dimiliki. Masyarakat berupaya untuk tetap mempertahankan permukiman mereka, namun disisi lain juga pemerintah berupaya untuk tetap menjalankan aturan dengan mengeluarkan kebijakan baru yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Kata kunci: konflik tanah, permukiman, habitus, modal, arena, praktik sosial.

***THE STRUGGLE FOR THE RIGHTS TO SETTLEMENT AND
PROTECTED FOREST AREAS IN GADING SARI VILLAGE,
KUNDUR DISTRICT***

By
Elvin Yofinda Salko
NIM. 180569201006

ABSTRACT

The phenomenon of land conflict is one of the problems that often occurs in society. Land is a basic human need for life, so every human being tries to own and control it. One of the land conflicts that occurred was over a protected forest area that only had a forest and the main function of protection, but in reality, the designation of a protected forest area in Gading Sari Village was a residential area, public facilities, and community-cultivated land and not a natural forest. The fact that forests cannot be separated from human elements such as the presence of local communities that have lived in the area for generations Even before there were state regulations, the context of forest areas had to be placed in the mindset of spatial planning and interactions between elements. This condition worries the local community because, despite the ownership they have, the overlapping regulations experienced by the community make the community still have to defend their right to housing for survival. Meanwhile, the government is trying to keep implementing policies, which in this case are to protect protected forest areas according to their functions. The purpose of this study was to find out how the community's efforts in fighting for the right to settle in the protected forest area of the Gading Sari Village, Kundur District, were explained by Pierre Bourdieu's Social Practice Theory. The method used in this study is a qualitative one with as many as 12 informants and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study found that the habitus owned by the community is understood to be that the Gading Sari Village is not owned by anyone, but the rules that have been issued by the government as symbolic capital will change the community's habitus and make the Gading Sari Village an arena of struggle with various capitals owned. The community is trying to maintain their settlements, but on the other hand, the government is also trying to keep implementing the rules by issuing new policies that are adapted to the conditions of the community.

Keywords: land conflict, settlement, habitus, capital, arena, social practice.